



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis manajemen pertahanan Indonesia dalam menghadapi *post-pandemic*

Yudi Sutrasna^{*)}

Universitas Pertahanan, Citeureup, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 19th, 2024
Revised Aug 25th, 2024
Accepted Sept 29th, 2024

Keywords:

Manajemen pertahanan
Strategi pertahanan
Post-pandemic
Ancaman nonmiliter
Pentahelix

ABSTRACT

Covid-19 menjadi salah satu ancaman non militer yang tidak dapat diduga. Selama kurang lebih tiga tahun, Indonesia mengalami masa transisi yang memberikan dampak ekonomi dan social terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga, negara memerlukan strategi dalam menghadapi ancaman tersebut. Oleh sebab itu, negara melibatkan seluruh pemangku kebijakan di berbagai sektor yang berhubungan dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait manajemen pertahanan Indonesia dalam menghadapi post-pandemic. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap mahasiswa Universitas Pertahanan dan ahli manajemen pertahanan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun manajemen pertahanan di Indonesia dalam menghadapi ancaman non militer covid-19 dilakukan dengan memperkuat unsur pentahelix. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara menghadapi berbagai ancaman dengan strategi pertahanan semesta yang didukung dengan kebijakan umum pertahanan negara yang telah dipertimbangkan secara holistik tentang apa, bagaimana, siapa dan melakukan apa. Implikasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk terus mengedepankan unsur pentahelix dalam berbagai ancaman non militer.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Yudi Sutrasna,
Universitas Pertahanan
Email: yudi.sutrasna@idu.ac.id

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah secara signifikan mengganggu stabilitas dan keamanan global, sehingga memaksa negara-negara, terutama Indonesia, untuk segera mengatasi situasi ini dengan cepat dan efisien (Suparman, 2021; Susilowati et al., 2023). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi berbagai tantangan yang rumit dalam menangani berbagai dampak dari pandemi ini secara efektif. Indonesia tidak hanya mengalami dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menghadapi implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan yang substansial. Manajemen pertahanan Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas dan ketahanan nasional dalam kerangka kerja khusus ini. (Hidayat et al., 2022; Legionosuko et al., 2019)

Manajemen di dalam pemerintahan bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Tetapi, pentingnya manajemen untuk kepentingan kesejahteraan rakyat perlu untuk diterapkan. Menurut hasil penelitian William Djani (2022) NPM adalah kumpulan ide manajemen yang diperkenalkan selama tahun 1980-an. Di Swedia,

NPM diimplementasikan melalui dua kategori tindakan utama, yang disebut korporatisasi dan marketisasi. Korporatisasi mencakup gagasan bahwa tidak ada perbedaan besar antara perusahaan di sektor swasta dan lembaga di sektor publik. Oleh karena itu, agar lebih efisien, badan-badan di sektor publik harus dikelola dan diorganisir dengan cara dan alat yang sama seperti perusahaan swasta. (Seno, 2022)

Manajemen pertahanan menjadi salah satu sinergi yang dapat dibangun melalui pemetaan dengan tindak lanjut sebagai sebuah model atas adanya ancaman yang ada. Berkenaan dengan ancaman tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa pertahanan negara terdiri dari pertahanan militer dan nirmiliter. Pada era sebelumnya pertahanan militer lebih sering muncul karena perang yang terjadi hanya terbatas pada ruang dan waktu (Presiden, 2021). Oleh karena itu, kekuatan militer menjadi penentu utama kemenangan di dalam suatu pertempuran. Sayangnya, di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, perang sudah tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Sehingga, ancaman nonmiliter menjadi kondisi yang membutuhkan strategi pertahanan dalam mengatasinya. Pada akhir 1990-an, gagasan pertahanan adaptif diadopsi (Wulff, 2006). Artinya, pertahanan bisa menyusut, sementara tingkat ancamannya rendah, dan kemudian mulai berkembang lagi ketika situasi keamanan memburuk. Kondisi ini juga melibatkan lebih banyak investasi dalam intelijen dan penelitian. Pengembangan teknis berfokus pada prototipe dan demonstran untuk mempertahankan fleksibilitas teknis. Pengurangan organisasi pertahanan dilakukan untuk mempertahankan inti kecil unit operasional yang lebih berkualitas dan berkualitas tinggi, daripada mempertahankan sejumlah besar unit operasional dengan kualitas terbatas. (Haryanto & Lunarindiah, 2023; Sutrasna, 2023; Yulianto et al., 2021)

Memasuki akhir tahun 2019, dunia dihadapkan dengan adanya virus yang dikenal dengan sebutan Corona Virus Disease (Covid-19) (Ali, 2020). Penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 telah mengubah pola perilaku dan interaksi antar manusia dan mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa termasuk bidang pertahanan negara (Wind et al., 2020). Perkembangan virus tersebut terbilang sangat cepat penularannya sehingga menimbulkan korban jiwa dan mempengaruhi hubungan antar negara di dunia secara signifikan (Asmadi et al., 2021). Melihat situasi dan kondisi yang terjadi khususnya pada ancaman dan tantangan pandemi Covid-19, mengubah paradigma yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ancaman militer tetapi juga aspek ancaman nonmiliter yang dimungkinkan akan memberikan dampak yang lebih besar (Hirawan, 2020). Setelah tiga tahun menghadapi masa pandemic, kemudian beralih ke masa transisi post-pandemic covid. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait manajemen pertahanan Indonesia dalam menghadapi post-pandemic. (Firmansyah & Chalimi, 2021; Pasha et al., 2021)

Konteks historis yang rumit mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan penting terkait implementasi administrasi pertahanan di Indonesia setelah pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap metode dan kebijakan pertahanan yang diberlakukan selama dan selama pandemi. Tujuan utamanya adalah untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diterapkan, menganalisis tantangan yang dihadapi, dan menyarankan peluang potensial untuk meningkatkan keamanan nasional. (Bangsawan, 2023)

Setelah pandemi, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang signifikan terkait dinamika ekonomi yang rumit, ketidakpastian kesehatan masyarakat, dan potensi ketegangan keamanan (Budisusila, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji langkah-langkah yang disarankan untuk meningkatkan dan memperkuat manajemen pertahanan Indonesia (Sarjito, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis bagi Indonesia dalam menavigasi masa depan yang tidak dapat diprediksi dan berubah dengan cepat dengan memberikan rekomendasi yang berasal dari analisis.

Penelitian ini memiliki arti penting tidak hanya bagi Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi masalah pasca pandemi, tetapi juga bagi komunitas internasional. Penelitian ini dapat memberikan wawasan penting tentang metode pertahanan yang efektif di era pasca pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi besar dalam memahami dan mengatasi masalah global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2012; S. Sugiyono, 2015). Hal ini dikarenakan peneliti bertujuan untuk menganalisis manajemen pertahanan yang dilakukan di Indonesia dalam menghadapi post-pandemic. Sehingga, pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi untuk mengungkapkan data secara deksriptif dan informatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Pertahanan bekerjasama dengan 10 mahasiswa aktif dan lima ahli di bidang manajemen pertahanan. Sepuluh mahasiswa aktif tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu mahasiswa aktif, memiliki pemahaman terkait dengan manajemen pertahanan dan pernah mengambil mata kuliah *strategic leadership*. Disamping itu, ahli bidang manajemen pertahanan dipilih sesuai dengan pemahaman dan latar belakang yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan *Focus Group Discussion* bersama dengan sepuluh mahasiswa (Afiyanti, 2008; Driya et al., 2021). FGD dilakukan selama 90 menit dengan topik manajemen pertahanan menghadapi post-pandemic. Disamping itu, wawancara mendalam dilakukan kepada lima ahli di bidang manajemen pertahanan berdasarkan hasil FGD dan studi literatur yang dilakukan. Wawancara dilakukan selama 60 menit setiap informan. Lokasi FGD dilakukan di ruang kelas Universitas Pertahanan. Sedangkan wawancara Bersama dengan ahli dilakukan sesuai dengan waktu mereka masing-masing. Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah peneliti uraikan di atas kemudian menelaahnya, membagi dan menemukan makna dari apa yang telah diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian disusun secara sistematis dan dilaporkan sebagai laporan penelitian. (P. D. Sugiyono, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan oleh peneliti melalui kebijakan yang terkait dengan penelitian, terdapat sifat total terpadu terarah berkelanjutan merupakan kata kunci dalam Strategi Pertahanan Semesta (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002), yang sejatinya dapat direalisasikan untuk memberi penguatan kepada dua keputusan strategik pemerintah RI. Dua keputusan tersebut adalah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 14 Maret 2020 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun, tanggal 22 Maret 2020, tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat misalnya membuat empat strategi yang akan konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai dasar mengatasi pandemik Virus Covid-19. Kondisi ini menjadikan Pelibatan seluruh pemangku kebijakan di berbagai sektor yang berhubungan dalam penanganan Covid-19 sehingga kedudukan, koordinasi, peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi jelas. Masing-masing pihak dapat membantu menjalankan fungsi masing-masing mulai dari aspek penanganan darurat bencana, recovery hingga pencegahan terjadinya bencana.

Pembentukan dua keputusan strategik tersebut muncul dari masalah koordinasi dan sinergi antar lembaga dan institusi pertahanan.

"Menurut saya, masalah koordinasi dalam menghadapi Covid-19 terlihat pada adanya kesulitan dalam mengalokasikan anggaran pertahanan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Selain itu, jumlahnya juga terbatas dan membutuhkan perizinan yang rumit dengan birokrasi dan formalitas yang harus dilalui." (Hasil wawancara A, Ahli Bidang Manajemen Pertahanan, 2023)

"Berdasarkan kondisi yang pernah dihadapi, keadaan ini juga mengindikasikan belum adanya lembaga pertahanan negara yang memiliki fungsi pertahanan militer dan nirmiliter, sehingga terdapat pembagian tugas antara lembaga yang berfokus menangani ancaman militer dan lembaga yang berfokus mengatasi ancaman nonmiliter." (Hasil wawancara A, Ahli Bidang Manajemen Pertahanan, 2023)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kondisi terkait masalah Covid-19 berdampak pada menurunnya efektivitas manajemen pertahanan negara, sehingga dibutuhkan alat yang mampu menghubungkan permasalahan antara ancaman militer dan nonmiliter menjadi satu kesatuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi pergeseran kebutuhan akan model manajemen pertahanan yang dapat mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sehingga, bukan hanya menghadapi pandemik Covid-19 tetapi juga ancaman non-militer lainnya yang melebihi pandemik tersebut. (Anityo et al., 2024)

Pemerintah Indonesia melalui peraturan yang ada yaitu pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 14 Maret 2020 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun, tanggal 22 Maret 2020, tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sejalan dengan prinsip manajemen yang dikemukakan oleh (Briando et al., 2021). Menurut (Aslindah & Mulawarman, 2022) dalam manajemen ada dua prinsip yang harus dipenuhi, yaitu efektif dan efisien. Salah satu konsep utama yang dikemukakan Drucker sebagai salah satu tokoh besar manajemen, adalah Management By Objectives (MBO). MBO ini adalah suatu sistem yang menekankan efektivitas dan pengendalian mutu, tanpa mengesampingkan kreativitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Khabakuk, 1981). Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar, (Gea, 2014). Agar manajemen dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsinya. Pemerintah berupaya untuk melakukan pentahelix dimana unsur elemen pemerintah, masyarakat, Lembaga

usaha, akademisi dan media saling bahu-membahu dalam menghadapi ancaman non militer seperti pandemic covid-19. (Susanto, 2022)

Melalui MBO, pemerintah melakukan konsep *plan, do, check* dan *act*. Pada proses penyusunan kebijakan tersebut, pemerintah bersama dengan berbagai instansi seperti Kementerian Pertahanan merencanakan perubahan yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ditemukan. Kemudian melakukan pengujian dan memeriksa hasilnya untuk selanjutnya bertindak (Adikara & Munandar, 2021). Disisi lain, Budi dan Anwar (Budi & Anwar, 2020) menjelaskan bahwa strategi yang dilaksanakan untuk menghadapi Covid-19 pada saat itu melalui perspektif perang semesta dimana terdapat strategi utama, strategi cadangan dan strategi pendukung. Seperti halnya strategi utama dimana dilaksanakan oleh tenaga medis untuk menagan peningkatan status korban pandemic.

"Sebenarkan Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Kemhan memang memiliki pusat rehabilitasi yang salah satu fungsinya adalah perumahnya sakit. Sehingga, upaya dari Kementerian Pertahanan mendukung penanganan pandemic Covid-19 dengan mengoptimalkan layanan sarana dan prasarana rumah sakit." (Hasil wawancara C, Ahli Bidang Manajemen Pertahanan, 2023)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi utama menjadi landasan bagi Kementerian Pertahanan sebagai instansi pemerintah membantu menangani penyebaran covid-19. Keputusan tersebut juga dilandasi dengan MBO. Hanya saja, diperlukan controlling dalam melaksanakan aksi atau hasil Tindakan yang harus dilakukan selama post-pandemic. Sehingga, tahap selanjutnya diperluka konsep manajemen yang disampaikan (Tumbade, 2022) (1969) dimana *planning, organizing, command, coordinating* dan *controlling* menjadi strategi yang dapat mendukung pemerintah dalam menghadapi post-pandemic.

"pentahelix menjadi alternatif lain yang dapat mendukung manajemen pertahanan menghadapi post-pandemic. Mengingat kita tidak bisa mempredikis beragam bencana atau ancaman non militer yang akan ada. Tetapi melalui manajemen pertahanan kondisi tersebut dapat dihindari dengan melakukan observasi dan uji coba." (Hasil wawancara D, Ahli Bidang Manajemen Pertahanan, 2023)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kerjasama berbagai instansi dan masyarakat serta pengusaha menjadi penting dalam menghadapi post-pandemic dan ancaman non militer lainnya. Disamping itu, manajemen pertahana juga memiliki fungsi yang tidak hanya menetapkan tujuan maupun kebijakan tetapi juga strategi untuk menyeimbangkan alokasi sumber daya yang terbatas. Hasil FGD yang dilakukan oleh peneliti juga memberikan gambaran bahwa penerapan manajemen pertahanan muncul dikarenakan beberapa faktor, yaitu sumber daya yang belum dikelola, sejarah pasca perang, dan perubahan sistem pemerintahan. Dalam konsep pertahanan, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara, Pasal 2 sampai dengan 5, dijelaskan mengenai sumber daya manusia dalam konteks pertahanan. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa asas pelaksanaan PSDN adalah: tujuan, kesemestaan, kejuangan, kebersamaan dan gotong royong, manfaat, legalitas, selektivitas, efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Sementara dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan pelaksanaan PSDN untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Selain itu pada Pasal 4 tujuan pelaksanaan PSDN juga untuk menghadapi ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah: ancaman militer, ancaman nonmiliter; dan/atau ancaman hibrida. Ancaman sebagaimana dimaksud dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Oleh sebab itu, manajemen pertahanan menjadi penting dalam mengatasi berbagai ancaman yang ada. (Rijanta & Baiquni, 2021)

Untuk itu, dalam menghadapi post-pandemic, transformasi tidak hanya menghasilkan penyesuaian dengan sistem pemerintahan tetapi juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam menciptakan dan mengintegrasikan struktur dan prosedur yang sesuai untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi baru dan inovasi operasional (Barus et al., 2024). Sehingga dapat disimpulkan, kedua konsep manajemen pertahanan seperti MBO maupun yang dikembangkan oleh Fayol memiliki tujuan yang sama, yaitu agar setiap negara diharapkan memiliki angkatan bersenjata yang tidak berlebihan dibandingkan dengan kemampuan finansial untuk kepentingan kesejahteraan dari rakyatnya.

Discussion

Temuan studi ini menunjukkan bahwa manajemen pertahanan Indonesia menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menangani konsekuensi pandemi secara efektif, terutama dalam hal mengoordinasikan dan menyelaraskan upaya di antara organisasi dan lembaga pertahanan. Wawasan yang diperoleh dari percakapan dengan para profesional di bidang manajemen pertahanan telah menggarisbawahi tantangan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mengatasi risiko non-militer, seperti epidemi Covid-19. Selain itu, tidak adanya organisasi pertahanan yang menyediakan kemampuan kohesif yang mencakup pertahanan militer dan nirmiliter menjadi penghalang dalam mengatasi tantangan yang rumit.

Dalam kerangka kerja khusus ini, terdapat kebutuhan akan filosofi manajemen pertahanan yang komprehensif, terarah, dan bertahan lama. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi ancaman non-militer Covid-19 dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan mengeluarkan instruksi presiden untuk mengalihkan kegiatan dan mengalokasikan anggaran yang sesuai. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan metode Pentahelix, yang mencakup pemerintah, masyarakat, lembaga komersial, akademisi, dan media, untuk mengatasi dampak dari epidemi ini.

Wawancara yang dilakukan dengan spesialis di bidang manajemen pertahanan menyoroti pentingnya perombakan mendasar dalam administrasi pertahanan, terutama dengan mengadopsi kerangka kerja Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian, dan Pengendalian (Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, and Controlling - POCCC) yang dikemukakan oleh Fayol. Implementasi gagasan ini dicapai melalui pemanfaatan manajemen berdasarkan tujuan (MBO), yang memberdayakan pemerintah untuk berhasil menyusun strategi, melaksanakan, mengevaluasi, dan beradaptasi dalam menanggapi ancaman non-militer.

Pentingnya mengintegrasikan keamanan militer dan non-militer diakui sebagai cara untuk mengatasi ancaman yang rumit, seperti pandemi dan bahaya non-militer lainnya. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi contoh pemanfaatan gagasan Management by Objectives (MBO) dan Planning, Organizing, Coordinating, Commanding, and Controlling (POCCC) dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk mengatasi risiko pascapandemi. (Laturrakhmi et al., 2023)

Dalam kerangka kerja ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, menetapkan pedoman pelaksanaan PSDN dengan tujuan untuk mengatasi tantangan non-militer, seperti pandemi Covid-19. Pentingnya manajemen militer dalam mengawasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, terlihat jelas dalam fungsinya untuk menjaga kedaulatan negara dan menjamin keamanan nasional.

Pada akhirnya, hasil wawancara dan analisis data menunjukkan bahwa manajemen pertahanan di Indonesia harus terus berevolusi dan menjalani transformasi untuk mengatasi tantangan pasca-pandemi secara efektif. Keberhasilan navigasi kesulitan pascapandemi yang kompleks bergantung pada penerapan gagasan Management by Objectives (MBO) dan Plan, Organize, Coordinate, Control, and Communicate (POCCC), serta integrasi tanpa batas antara strategi keamanan militer dan nirmiliter. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang dinamika dan metode yang terlibat dalam manajemen militer di Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menghadapi post-pandemic manajemen pertahanan menjadi penting untuk dilakukan. Terlebih tantangan menjaga keamanan negara tidak lagi sebatas kebijakan luar negeri dan perangkat berkaitan dengan militer yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan kekuatan militer, tetapi juga pada sosial, ekonomi, masalah lingkungan, moral dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung adanya unsur pentahelix yang dapat saling bersinergi. Implikasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk terus mengedepankan unsur pentahelix dalam berbagai ancaman non militer.

Referensi

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1).
- Afiyanti, Y. (2008). Focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62.

- Ali, I. (2020). The COVID-19 Pandemic: Making Sense of Rumor and Fear: Op-Ed. *Medical Anthropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness*, 39(5), 376–379. <https://doi.org/10.1080/01459740.2020.1745481>
- Anityo, A. S., de Fretes, C. H. J., & Simanjuntak, T. R. (2024). Peningkatan Kerja Sama Militer antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Canadian Armed Forces (CAF) dalam Upaya Mendukung Sasaran Strategis Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(03), 10–21.
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(2), 65–74.
- Asmadi, D., Hidayatullah, H., Juwita, J., Andriansyah, A., Rahmawati, S., & Riza, M. (2021). Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Siswa Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Panti Asuhan Yakesma. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(2), 119–130.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40.
- Barus, E., Pardede, K. M., & Manjorang, J. A. P. B. (2024). Transformasi Digital: Teknologi Cloud Computing dalam Efisiensi Akuntansi. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 904–911.
- Briando, B., Suryana, O., & Embi, M. A. (2021). Social network analysis terkait implementasi sistem kesehatan pertahanan negara dalam persepektif penanganan covid-19. *Journal of Administration and International Development*, 1(2), 1–17.
- Budi, & Anwar, S. (2020). Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, 6(1), 71–100.
- Budisusila, A. (2021). *Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid 19*. Sanata Dharma University Press.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: planning, conducting, and evaluation quantitative and qualitative research*. Pearson Education.
- Driya, P. D., Putra, I. G. L. A. R., & Pradyana, I. M. A. (2021). Teknik Pengumpulan Data Pada Audit Sistem Informasi Dengan Framework Cobit. *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal*, 2(2), 70–83.
- Firmansyah, H., & Chalimi, I. R. (2021). Urgensi dan Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4053–4063.
- Gea, A. A. (2014). Time management: Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. *Humaniora*, 5(2), 777–785. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3133>
- Haryanto, J., & Lunarindiah, G. (2023). Pengaruh strategi manajemen rantai pasok terhadap kinerja operasional dengan mediasi kompetensi organisasi pada usaha mikro, kecil dan menengah. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1187–1196.
- Hidayat, A., Anam, S., & Munir, A. M. (2022). Diplomasi Vaksin: Strategi Indonesia dalam Memperkuat Keamanan Kesehatan Nasional di Tengah Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 17–34.
- Hirawan, F. B. (2020). *Indonesia dan covid-19: pandangan multi aspek dan sektoral*. Centre for Strategic and International Studies.
- Khabakuk, M. (1981). management by objectives. *International Studies of Management & Organization*, 11(3–4), 114–122. <https://doi.org/10.1080/00208825.1981.11656324>
- Laturrakhmi, Y. F., Oktaviani, F. H., & Kriyantono, R. (2023). Communicative Leadership among Local Leaders in Indonesia during covid-19 Crisis Management. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 283–298.
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan strategi indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295–312.
- Lundberg, A., & Rova, E. (2022). Management Reforms in the Defence Sector. *Defence and Peace Economics*, 33(4), 454–474. <https://doi.org/10.1080/10242694.2021.1888014>
- Pasha, S., Perdana, M. R., Nathania, K., & Khairunnisa, D. (2021). Upaya mengatasi krisis identitas nasional generasi z di masa pandemi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 651–659.
- Presiden, P. (2021). *Peraturan Presiden No 8 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Rijanta, R., & Baiquni, M. (2021). *Rembug Pageblug: Dampak, Respons, dan Konsekuensi Pandemi Covid-19 dalam Dinamika Wilayah*.
- Sarjito, A. (2023). Integrasi kebijakan pertahanan dan respon bencana diindonesia. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 163–175.
- Seno, R. H. (2022). New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(1).
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta. CV.

-
- Suparman, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42.
- Susanto, S. (2022). Inovasi Manajemen Perencanaan untuk Peningkatan Mutu Madrasah dalam Situasi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(1).
- Susilowati, I., Affandi, A. N., Raihana, C. J., & Az-Zahra, E. I. (2023). Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok dalam Diplomasi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(1), 125–140.
- Sutrasna, Y. (2023). Analisis Manajemen Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Post-Pandemic. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5609–5616. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>
- Tumbade, M. O. (2022). Sistem Informasi Dalam Mendukung Kematangan Planning Smart City E-Government Untuk Peningkatan Kapabilitas Pelayanan Pemerintah Lombok Timur Terhadap Masyarakat. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(3), 2137–2152.
- Djani, W. (2022). Administrasi Publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital). Zifatama Jawara.
- Wind, T. R., Rijkeboer, M., Andersson, G., & Riper, H. (2020). The COVID-19 pandemic: The ‘black swan’ for mental health care and a turning point for e-health. *Internet Interventions*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2020.100317>
- Wulff, J. L. (2006). Ecological interactions of marine sponges. *Canadian Journal of Zoology*, 84(2), 146–166. <https://doi.org/10.1139/z06-019>
- Yulianto, H., Sutomo, Y., & Aditya, G. (2021). Penerapan talent manajemen untuk meningkatkan produktivitas karyawan pada usaha kecil dan menengah (UKM). *Segmen: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 123–136